



PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER

LKIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

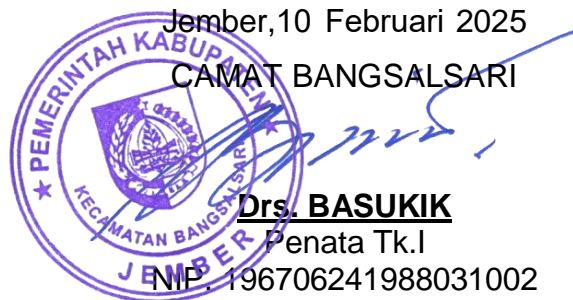
Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Bangsalsari. Kinerja Kecamatan Bangsalsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024.

Jember, 10 Februari 2025

CAMAT BANGSALSARI



Drs. BASUKIK

Penata Tk.I

NIP. 196706241988031002

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	14
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022	14
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	15
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	30
BAB IV. PENUTUP.	33
LAMPIRAN	
Lampiran 1.	Matriks Rencana Strategis Perubahan (RS) 2021-2026
Lampiran 2.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
	Lampiran 3.
	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Lampiran 4.	Lampiran SK IKU PD 2023
Lampiran 5.	Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Bangsalsari tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren penurunan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Bangsalsari telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 6 (enam) indikator capaian diatas target yaitu 4 (empat) Indikator Capaiannya dalam kategori Sangat Tinggi, 2 (dua) indikator capaian dalam kategori Tinggi. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 96,95% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 4.167.181.122 dan Belanja Modal sebesar 3,05% atau sebesar Rp. 130.938.300.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.771.799.559 atau 91% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Terbatasnya jumlah tenaga ASN
2. Terbatasnya jumlah anggaran untuk pemeliharaan / pengadaan sarana dan prasarana yang berada di bawah pengelolaan Kecamatan Bangsalsari
3. Terbatasnya kapasitas SDM perangkat Kec. Bangsalsari serta SDM

kapasitas Perangkat Desa

4. Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :
5. Merumuskan perencanaan kegiatan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja.
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
7. Melaksanakan sosialisai / bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM perangkat Kec. Bangsalsari serta SDM kapasitas Perangkat Desa se Kec. Bangsalsari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Bangsalsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Bangsalsari tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Bangsalsari adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Bangsalsari
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BANGSALSARI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Bangsalsari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Bangsalsari merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- 2) Kecamatan Bangsalsari dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kecamatan Bangsalsari mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,

- ketentraman dan ketertiban umum, dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat Kecamatan;
- b) mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - c) membina penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ada di wilayahnya;
 - d) mengoordinasi penyusunan dan pembuatan program kerja dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan pemberian pelayanan administrasi;
 - e) mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
 - f) membina atau memotivasi serta memelihara terus menerus kemampuan prestasi pegawai di lingkungan kecamatan guna meningkatkan produktivitas kerja;
 - g) mengkaji, mengoreksi, dan memeberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati;
 - h) memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan tugasnya;
 - i) mempertanggungjawabkan tugas kecamatan secara operasional kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - j) memepertanggungjawabkan tugas kecamatan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kebersihan lingkungan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
- k. pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Pemberian pertimbangan teknis;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- 1) Penetapan;
- 2) Penyelenggaraan; dan
- 3) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Bangsalsari terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum ;
 - g. Desa / Kelurahan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BANGSALSARI

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Bangsalsari yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Bangsalsari yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 13 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 11 orang atau 54,17 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	2			1	1	1				1		1	
2. Pengawas	6			6		5		1		2	2	3	2
3. Pelaksana	16	8	7	1		7		5		2		7	
Jabatan Fungsional													
Non ASN						15		9		6		14	1
Jumlah	24	8	7	8	1	28		15		11	2	25	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bangsalsari 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Bangsalsari belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Bangsalsari.

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN BANGSALSARI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Bangsalsari menempati gedung di Jl. Ahmad Yani Nomor 48 Bangsalsari.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Bangsalsari kurang memadai, karena sarana dan kurang memadai Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Bangsalsari adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Bangsalsari
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	3	Baik	3
2	Pompa	2	Baik	2
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Baik	1
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14	Baik	14
5	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	40	Baik	40
6	Alat Kantor Lainnya	9	Baik	9
7	Meubelair	205	Baik	205
8	Alat Pendingin	27	Baik	27
9	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18	Baik	18
10	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik	1
11	Meja Kerja Pejabat	35	Baik	35
12	Meja Rapat Pejabat	1	Baik	1
13	Kursi Kerja Pejabat	4	Baik	4
14	Kursi Rapat Pejabat	10	Baik	10

15	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	8	Baik	8
16	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	1	Baik	1
17	Peralatan Studio Audio	1	Baik	1
18	Peralatan Studio Video Dan Film	3	Baik	3
19	Alat Komunikasi Telephone	2	Baik	2
20	Personal Komputer	22	Baik	22
21	Peralatan Mainframe	1	Baik	1
22	Peralatan Personal Komputer	17	Baik	17
23	Alat Pendukung Pencarian	4	Baik	4
24	Bangunan Gedung Kantor	4	Baik	4
25	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	Baik	1
26	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2	Baik	2
27	Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar	1	Baik	1
28	Bangunan Gedung Garasi/Pool	2	Baik	2
29	Rumah Negara Golongan III	1	Baik	1
30	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	2	Baik	2

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN BANGSALSARI

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Bangsalsari memiliki 4 Program, 9 Kegiatan, dan 13 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.298.119.422,00 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Bangsalsari
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.824.572.622,00
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.364.264.182,00
1.1.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	2.126.424.182,00
1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	237.840.000,00
1.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.038.300,00
1.2.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	88.038.300,00

1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.281.640,00
1.3.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.281.640,00
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.988.500,00
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000,00
1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	22.000.000,00
1.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	59.488.500,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.047.945.000,00
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1.037.645.000,00
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1.037.645.000,00
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	10.300.000,00
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	10.300.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	69.481.800,00
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.281.800,00
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	8.375.000,00
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	38.906.800,00
3.2	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	22.200.000,00
3.2.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	22.200.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	356.120.000,00
4.1	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	356.120.000,00
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	356.120.000,00
JUMLAH		4.298.119.422,00

Sumber Data : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Bangsalsari dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Bangsalsari dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu :

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Bangsalsari terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Barat dengan luas wilayah Luas wilayah Kecamatan Bangsalsari adalah berkisar $\pm 166,78$ km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Pegunungan Argopuro;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Rambipuji;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Balung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Tanggul.

Jumlah penduduk di Kecamatan Bangsalsari sebanyak 124.264 jiwa penduduk laki laki, dan sebanyak 61.944 Jiwa dengan persentase 49,85% penduduk perempuan 62.320 Jiwa dengan persentase 50,15%. penduduk Kecamatan Bangsalsari memiliki mata pencaharian antara lain :

1. Bidang pertanian 14,32 % sebanyak 18.100 jiwa
2. Bidang perdagangan 1,03 % sebanyak 1.307 jiwa
3. Pengangguran 24,41 % sebanyak 30.849 jiwa
4. Buruh harian 0,79 % sebanyak 997 jiwa
5. PNS 0,32 % sebanyak 408 jiwa
6. Nelayan 0,01 % sebanyak 18 jiwa
7. Pelajar 13,45 % sebanyak 16.998 jiwa
8. Ibu rumah tangga 14,85 % sebanyak 18.763 jiwa
9. Buruh tani 6,60 % sebanyak 8.347 jiwa
10. Karyawan swasta 1,37 % sebanyak 1.726 jiwa
11. Bidang lainnya 2,50 % sebanyak 3.162 jiwa

Secara administratif, Kecamatan Bangsalsari membawahi 11 desa yaitu:

1. Desa Bangsalsari
2. Desa Sukorejo
3. Desa Karangsono
4. Desa Gambirono
5. Desa Curahkalong
6. Desa Langkap

7. Desa Tisnogambar
8. Desa Petung
9. Desa Tugusari
10. Desa Banjarsari
11. Desa Badean

Sumber Data : Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka (BPS)

I. POTENSI BENCANA ALAM

Berdasarkan letak kecamatan bangsalsari yang berada dibawah lereng gunung argopuro, ada beberapa petensi bencana yang terjadi setiap tahunnya antara lain sebagai berikut :

- a. Banjir
- b. Tanah Longsor
- c. Angin Puting beliung

J. POTENSI WISATA LOKAL

Kecamatan Bangsalsari berada di wilayah yang strategis di Kabupaten Jember. Dengan akses yang mudah dari pusat kota Jember, Kecamatan Bangsalsari mempunyai beberapa Desinasi wisata yang mudah dijangkau oleh berbagai jenis kendaraan. Desa yang memiliki Desinasi wisata diantaranya sebagai berikut :

1. Desa Badean memiliki wisata yang bernama Puncak Badean, dengan menyuguhkan wisata diantaranya :
 - a. Wisata Alam dan Taman Rekreasi: Keindahan alam Desa Badean yang masih alami sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata alam. Taman rekreasi desa dapat menjadi tempat yang ideal untuk bersantai, menikmati udara segar, serta melakukan kegiatan luar ruangan seperti piknik dan berjalan kaki.
 - b. Wisata Edukasi Pertanian: Mengingat banyaknya lahan pertanian di desa ini, wisata edukasi pertanian dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin belajar tentang pertanian tradisional dan modern. Pengunjung bisa belajar langsung dari para petani tentang cara bercocok tanam dan menjaga kesuburan tanah.

- c. Wisata Kuliner Lokal: Desa Badean juga dikenal dengan berbagai makanan khas yang menggugah selera. Kuliner lokal, seperti olahan hasil pertanian dan produk-produk tradisional lainnya, bisa menjadi daya tarik wisatawan yang ingin mencicipi masakan khas desa.
 - d. Wisata Budaya dan Tradisi: Sebagai desa dengan kehidupan yang erat dengan adat dan tradisi, Desa Badean memiliki potensi untuk mengembangkan wisata budaya. Acara adat dan festival lokal bisa menjadi atraksi menarik bagi wisatawan yang tertarik dengan kekayaan budaya Indonesia.
2. Desa Tugusari dengan Agro Wisata Sumber Pelangi 3 Bidadari yang di luncurkan Sabtu (6/05/2023), dengan menyuguhkan wisata diantaranya :
- a. Wisata Alam dan Taman Rekreasi: Keindahan alam Desa Badean yang masih alami sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata alam. Taman rekreasi desa dapat menjadi tempat yang ideal untuk bersantai, menikmati udara segar, serta melakukan kegiatan luar ruangan seperti piknik dan berjalan kaki.
 - b. Pemandian umbul pelangi dengan Amphitheater dan Waterpark

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Bangsalsari merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Bangsalsari Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Bangsalsari yaitu

Misi RPJMD :

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

Tujuan RPJMD :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi, dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Bangsalsari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian	Persentase Indikator Program	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Target Kinerja Perangkat Daerah	yang tercapai						
---------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (Nilai IKM)	80 (Nilai IKM)	85 (Nilai IKM)	85 (Nilai IKM)	90 (Nilai IKM)	90 (Nilai IKM)
Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	80%	80%	85%	85%
Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	80%	80%	85%	85%	90%	90%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p>		
<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.</p>	<p>Nilai SAKIP OPD</p>	<p>Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>	<p>- Camat</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD</p>

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Bangsalsari no 065/09/35.09.09/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (Nilai IKM)
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%

4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	85%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (69)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.811.920.407,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rp. 1.047.945.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 69.481.800,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 356.120.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.285.467.207,00	

Sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran pada DPA tahun 2024 pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, telah disusun PK Perubahan Kecamatan Bangsalsari sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bangsalsari

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok

2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (Nilai IKM)
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	85%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (69)
6	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bangsalsari tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.824.572.622,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.047.945.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 69.481.800,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 356.120.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.298.119.422,00	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bangsalsari terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.824.572.622,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.824.572.622,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 65,72% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Bangsalsari

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp 1.047.945.000,00
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran Rp 69.481.800,00
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp 356.120.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 1.473.546.800,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 34,28% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Bangsalsari

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Bangsalsari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Bangsalsari menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA . KECAMATAN BANGSALSARI.

Kecamatan Bangsalsari telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bangsalsari dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	96%	96%	100%	96%

2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (Nilai IKM)	84.02 (Nilai IKM)	99%	90 (Nilai IKM)	93%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	100%	125%	85%	125%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	85%	100%	118%	90%	118%
5	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (69)	A (85,44)	124%	BB (75)	85%

Sumber Data Realisasi : 1. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD (SIPPD)

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi Sukma-e Jatim

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah). indikator sasaran .Kecamatan Bangsalsari rata rata mencapai 98,75% dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan 97,25% kategori Sangat Tinggi Dengan demikian

maka secara umum Kecamatan Bangsalsari telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	94,80%	93,67%	96%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	82.27%	85,08%	84.02%
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	100%	100%	100%
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	-	C (30,46)	BB (71,05)	A (85,44)
--	-----------------	---	-----------	------------	-----------

Sumber Data Realisasi: 1. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD (SIPPD) Triwulan IV 2024
2. Laporan Kinerja Tahun 2023
3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi Sukma-e Jatim

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren penurunan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Bangsalsari dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	96%	-	
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.02 (Nilai SKM)		
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%		
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%		
5	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok		
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	A (85,44)		

Sumber Data: 1. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD (SIPPD) Triwulan IV 2024

2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi Sukma-e Jatim

Realisasi kinerja atas indikator sasaran tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
		(Rp.)	(Rp.)	
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan A.1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.113.771.967	Rp 1.856.039.310	88%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 237.840.000	Rp 229.760.000	97%
	Kegiatan A.1 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 253.281.640	Rp 183.177.359	72%
	Kegiatan A.1 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 37.500.000	Rp 36.141.800	96%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 22.000.000	Rp 20.567.000	93%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 59.488.500	Rp 59.378.000	100%
	Kegiatan A.1 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 88.038.300	Rp 87.320.000	99%
Total		Rp 2.811.920.407	Rp 2.472.383.469	88%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan A.2 : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1.037.645.000	Rp 1.025.036.000	99%

	Kegiatan A.2 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 10.300.000	Rp 8.408.000	82%
Total		Rp 1.047.945.000	Rp 1.033.444.000	99%
Sasaran 3 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
	Kegiatan A.3 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 8.375.000	Rp 8.330.000	99%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 38.906.800	Rp 34.137.300	88%
	Kegiatan A.2 : Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan			

	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rp 22.200.000	Rp 21.236.800	96%
Total		Rp 69.481.800	Rp 63.704.100	92%
Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan A.4 : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 356.120.000	Rp 332.487.990	93%
Total		Rp 356.120.000	Rp 332.487.990	93%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 2.113.771.967	Rp 1.856.039.310
Output	Jumlah dokumen.	Orang/Bulan	18	16

Catatan : Realisasi Kinerja tidak sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa ASN yang telah pensiun.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp237.840.000	Rp229.760.000
Output	Jumlah dokumen.	Dokumen	14	14

Catatan : Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa yang tidak bisa terserap dikarenakan tidak adanya perubahan APBD pada Tahun 2024.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp253.281.640	Rp183.177.359
Output	Jumlah dokumen.	Laporan	12	12

Catatan : Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa yang tidak bisa terserap dikarenakan tidak adanya perubahan APBD pada Tahun 2024.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp37.500.000	Rp36.141.800

Output	Jumlah dokumen.	Unit	1	1
--------	-----------------	------	---	---

Catatan : Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa yang tidak bisa terserap dikarenakan tidak adanya perubahan APBD pada Tahun 2024.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp22.000.000	Rp20.567.000
Output	Jumlah dokumen.	Unit	1	1

Catatan : Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa yang tidak bisa terserap dikarenakan tidak adanya perubahan APBD pada Tahun 2024.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp59.488.500	Rp59.378.000
Output	Jumlah dokumen.	Unit	1	1

Catatan : Kegiatan terlaksana sesuai target.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp88.038.300	Rp87.320.000
Output	Jumlah dokumen.	Unit	10	10

Catatan : Kegiatan terlaksana sesuai target.

2. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp1.037.645.000	Rp1.025.036.000
Output	Jumlah dokumen.	Dokumen	12	12

Catatan : Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa RT/ RW yang kosong (Meninggal Dunia/ berhenti)



Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp10.300.000	Rp8.408.000
Output	Jumlah dokumen.	Laporan	12	12

Catatan : Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa yang tidak bisa terserap dikarenakan tidak adanya perubahan APBD pada Tahun 2024.



3. Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp8.375.000	Rp8.330.000
Output	Jumlah dokumen.	Lemb./ Des	11	11

Catatan : Kegiatan terlaksana sesuai target.

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp38.906.800	Rp34.137.300

Output	Jumlah dokumen.	Laporan	12	12
--------	-----------------	---------	----	----

Catatan : Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa yang tidak bisa terserap dikarenakan tidak adanya perubahan APBD pada Tahun 2024.



Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan

Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp22.200.000	Rp21.236.800
Output	Jumlah dokumen.	Keluarga	36	36

Catatan : Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa yang tidak bisa terserap dikarenakan tidak adanya perubahan APBD pada Tahun 2024.





4. Program: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp356.120.000	Rp332.487.990
Output	Jumlah dokumen.	Laporan	13	13

Catatan : Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa yang tidak bisa terserap dikarenakan tidak adanya perubahan APBD pada Tahun 2024.



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Bangsalsari berjumlah orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.167.181.122 , melaksanakan 4 program 9 kegiatan dan 13 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	96%	88%	Efisien
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	99%	99%	Efisien
3. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100%	92%	Efisien
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	100%	93%	Efisien
5. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	100%	97%	Efisien
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	124%	88%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: 96% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: 99% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 6: 124% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Bangsalsari menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Kinerja Daerah Target Perangkat						

Indikator 1.1 Persentase Indikator Program yang tercapai						
Rata rata capaian	96%	✓				
Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan						
Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat						
Rata rata capaian	99%	✓				
Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan						
Indikator 3.1 Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan						
Rata rata capaian	100%	✓				
Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan						
Indikator 4.1 Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat						
Rata rata capaian	100%	✓				
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan						

tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.						
Indikator : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah						
Rata rata capaian	100%	✓				
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.						
Nilai SAKIP OPD						
Rata rata capaian	124%	✓				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran.. mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 96%.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yang menjadi permasalahan

1. terdapat kendala atau hambatan dalam implementasi program dan kegiatan akibat perubahan regulasi dan kebijakan.
2. adanya permasalahan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektoral.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rencana strategis ke depan, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.
2. Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.

4. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
5. Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian kinerja perangkat daerah dapat kembali meningkat dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran.. mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 99%, Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target 100% tersebut adalah:

- a. Kualitas pelayanan publik wilayah di Kecamatan Bangsalsari belum Optimal diantaranya yaitu petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dan kemampuan petugas dalam pelayanan;
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik dalam hal tidak memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, seperti sinyal akses internet lemah
- c. Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan capaian target ini, beberapa rencana strategi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Melakukan standarisasi Operasi prosedur dan persyaratan pelayanan publik di Kecamatan Bangsalsari.
- b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Bangsalsari yang masih belum memadai dengan menambah jaringan internet dan kuota internet khusus untuk pelayanan umum.
- c. Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.

- d. Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
 - e. Melakukan survei kepuasan masyarakat (E Sukma) secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki kualitas pelayanan.
- Dengan upaya-upaya tersebut, target 100% kepuasan masyarakat Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2026 diharapkan dapat tercapai.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran.. mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%, Dalam Capaian Sasaran Strategis tersebut pada tahun 2024 Kecamatan diantaranya :

1. Target Kinerja peningkatan status 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Bangsalsari dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri sebanyak 10 (sepuluh) Desa dari 11 (sebelas) Desa ;
2. 11 (Sebelas) Desa dari 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Bangsalsari menjadi Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) pada tahun 2024
3. Perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2024 mencapai PBB % mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2022 perolehan Pajak PBB mencapai 38,38 % ; Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut tidak lepas adanya sinergi antar stakeholder di Kecamatan Bangsalsari, seperti Koramil dan Babinsa, kader posyandu dan tokoh masyarakat. Sinergi antar stakeholder tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi dan koordinasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya, dan pembentukan jaringan kerja. Sedangkan perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2024 mencapai PBB 38,38 % dapat tercapai dengan menyelenggarakan program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pajak bagi pembangunan desa. Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk

memudahkan proses penerimaan pajak dan meningkatkan system pengawasan penerimaan pajak (dengan melakukan Monev setiap triwulan di desa – desa). Dengan adanya sinergi antar stakeholder, diharapkan dapat tercipta program-program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun yang akan datang.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan, Kecamatan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%, Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategisnya, seperti pelaksanaan patroli rutin, penyusunan identifikasi

dan potensi kerja sama di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, peningkatan partisipasi pemuda, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Dengan melakukan hal-hal di atas, diharapkan Kecamatan dapat meningkatkan capaian kinerja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bangsalsari., pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.. yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. terealisasi sebesar Rp. 4.167.181.122,- (96,95%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. terealisasi sebesar Rp. 130.938.300 ,- (3,05%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% realisasi
		(Rp,-)	(Rp,-)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.693.634.322	2.342.163.469	87%
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.364.264.182	2.085.799.310	88%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.126.424.182	1.856.039.310	87%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	237.840.000	229.760.000	97%
1.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.038.300	87.320.000	99%

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.038.300	87.320.000	99%
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.281.640	183.177.359	72%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.281.640	183.177.359	72%
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.088.500	73.186.800	96%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	36.141.800	96%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.000.000	20.567.000	93%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.488.500	59.378.000	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.047.945.000	1.033.444.000	99%
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.037.645.000	1.025.036.000	99%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.037.645.000	1.025.036.000	99%
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.300.000	8.408.000	82%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.300.000	8.408.000	82%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	69.481.800	63.704.100	92%
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.281.800	42.467.300	90%

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.375.000	8.330.000	99%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.906.800	34.137.300	88%
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	22.200.000	21.236.800	96%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	22.200.000	21.236.800	96%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	356.120.000	332.487.990	93%
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	356.120.000	332.487.990	93%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	356.120.000	332.487.990	93%
	Jumlah	4.167.181.122	3.771.799.559	91%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Bangsalsari sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Bangsalsari disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Bangsalsari telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak indikator tidak mencapai target dengan kategori tinggi.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

- a) Mengimplementasikan dengan maksimal program dan kegiatan sesuai dengan regulasi dan kebijakan;
- b) Mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sectoral;
- c) Mengoptimalkan Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bangsalsari diantaranya yaitu petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dan kemampuan petugas dalam pelayanan;
- d) Mengadakan belanja sarana dan prasarana pelayanan publik dalam hal ini jaringan telekomunikasi yang memadai dan perangkat Komputer yang memenuhi standar;
- e) Mengembangkan/ meningkatkan Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan public;
- f) Memfasilitasi peningkatan status 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Bangsalsari dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri;
- g) Memfasilitasi 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Bangsalsari menjadi Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) pada tahun 2024;

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

- 1) Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.
- 2) Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
- 4) Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
- 5) Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 6) Melakukan standarisasi Operasi prosedur dan persyaratan pelayanan publik di Kecamatan Bangsalsari.
- 7) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Bangsalsari yang masih belum memadai.
- 8) Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- 9) Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
- 10) Melakukan survei kepuasan masyarakat (E Sukma) secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki kualitas pelayanan.
- 11) Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
- 12) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
- 13) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi;
- 14) program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.

- 15) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 16) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 17) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
- 18) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 19) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 20) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.
- 21) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat..

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI

JL. ACHMAD YANI NO. 48 ☎ (0331) 711418 JEMBER 68154
Email : kec.bangsalsari@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/09/35.09.09/2024

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Bangsalsari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

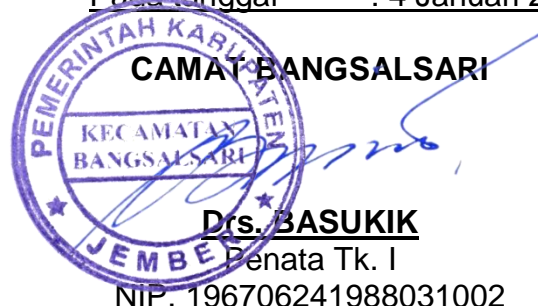
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Bangsalsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 4 Januari 2024


CAMAT BANGSALSARI
Drs. BASUKIK
Penata Tk. I
NIP. 196706241988031002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

- Instansi** : Kecamatan Bangsalsari
- Tugas** :
- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan:
- Fungsi** :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasionserta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. penanganan konflik sosial;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instanpemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KECAMATAN BANGSALSARI**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan</p>	- Seksi Pemerintahan - Seksi	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Merata dan Berkualitas di Kecamatan		<p>masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan <p>Kualitas sarana dan prasarana</p>	<p>Pelayanan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p>		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Jember, 4 Januari 2024



CAMAT BANGSALSARI

Dis. BASUKIK

Penata Tk. I

NIP. 196706241988031002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN BANGSALSARI

JL. Achmad Yani Nomor 48 Telp. (0331) 7114418 Bangsalsari 68154

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BASUKIK

Jabatan : Camat Bangsalsari

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

CAMAT BANGSALSARI,

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.



METERAI
TEMPEL
AB557AKX641649632

Drs. BASUKIK

NIP. 19670624 198803 1 002

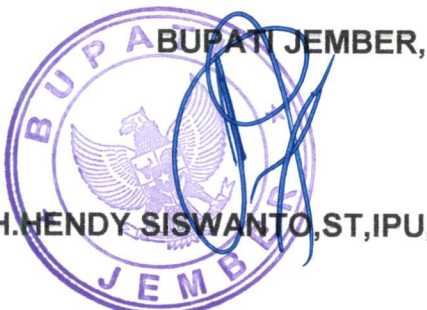
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KECAMATAN BANGSALSARI

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (Nilai IKM)
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	85%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (69)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.811.920.407,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.047.945.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 69.481.800,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 356.120.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.285.467.207,00	

Jember, 26 Januari 2024



Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.



Drs. BASUKIK
NIP. 196706241988031002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN BANGSALSARI

Jl. Achmad Yani Nomor 48 Telp. (0331) 7114418 Bangsalsari 68154

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BASUKIK

Jabatan : Camat Bangsalsari

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng

Jember, 26 November 2024

Pihak Pertama
CAMAT BANGSALSARI,



Drs. BASUKIK

NIP. 19670624 198803 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KECAMATAN BANGSALSARI

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (Nilai IKM)
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	85%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (69)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.824.572.622,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.047.945.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 69.481.800,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 356.120.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.298.119.422,00	

Jember, 26 November 2024

BUPATI JEMBER,

CAMAT BANGSALSARI,



Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

Drs. BASUKIK

NIP. 19670624 198803 1 002

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGSALSARI

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

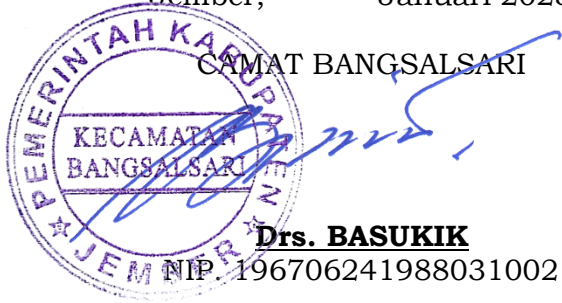
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD				B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	BB (75)	.		
			1 Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	Pengikutan bimtek dan diklat sesuai tusi masing-masing ASN serta pembinaan di bidang kepegawaian secara berkala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi				4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok			

	daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	dan Tata Laksana Pemerintah Daerah											
			3 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		80 (Nilai IKM)	85 (Nilai IKM)	85 (Nilai IKM)	90 (Nilai IKM)	90 (Nilai IKM)	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi..	Memberikan pelayanan secara prima dengan lebih humanis dan meningkatkan sarpras pelayanan, mempercepat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan memberikan purna layan dengan baik.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan		80%	80%	80%	85%	85%	Fasilitasi Peningkatan Usaha	Fasilitasi Pemberian pelatihan UMK dengan	Program Pemberdayaan Masyarakat

			Masyarakat di Kecamatan	masyarakat yang dilaksanakan							Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa	memperhatikan produk unggulan masyarakat desa, hingga pemasarannya	t Desa Dan Kelurahan
			Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat		80%	85%	85%	90%	90%	Penegakan Perda dan Perbup atau peraturan perundangan lainnya.	Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Jember, Januari 2023

CAMAT BANGSALSARI



Drs. BASUKIK
NIP. 196706241988031002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI

JL. ACHMAD YANI NO. 48 ☎ (0331) 711418 JEMBER 68154

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase realisasi anggaran	85%				

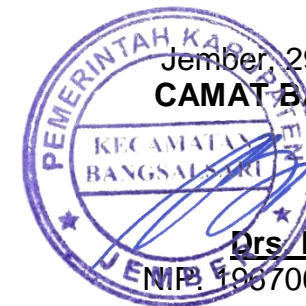
					Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung gjawaban keuangan	12 Lapora n	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 org/bln	2.113.771.9 67
								Pelaksanaa n Penatausah aan Dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	14 Dokum en	237.840.000
					Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	12 Lapora n	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Lapora n	253.281.640
					Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Lapora n	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	88.038.300

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	37.500.000
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	22.000.000
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	59.488.500
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	85%				

pemerintah an dan pelayanan p ublik.		Berkualitas di Kecamatan									
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 %	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dok	1.037.645.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	90%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.300.000
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	80%				
					Koordinasi Kegiatan	Persentase terlaksananya Kegiatan	80%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakata	11 Lemb. Kemas	8.375.000

					Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Desa		Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yarakan	
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	38.906.800
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Kecamatan yang dibina/diberdayakan	80%	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	36 Keluarga	22.200.000
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran	85%	Program Koordinasi Ketentraman dan	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan	85%				

		masyarakat di Kecamatan	Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat		Ketertiban Umum	ketertibann umum di tingkat kecamatan					
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	85%	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13 Laporan	356.120.000



Jember, 29 Januari 2024
CAMAT BANGSALSARI,

Drs BASUKIK
 NIP. 196706241988031002

